



**RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini merupakan kelanjutan Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dimana keduanya merupakan bagian yang integral dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang mana dalam penyusunannya Renja Kecamatan tetap mengacu kepada Renstra. Renja Kecamatan sendiri mendukung Visi dan Misi Kabupaten Kebumen. Di sisi lain Renja Kecamatan Poncowarno merupakan dasar dalam penyusunan KUA dan RKA. Kemudian menentukan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun ke depan, dengan demikian akan mempermudah dalam menentukan arah dan tujuan sekaligus akan mempermudah dalam menilai atau mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

Namun demikian, sebaik apapun rencana yang dibuat perlu sekali kerja sama semua pihak dalam pelaksanaannya, baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang saling mendukung dari semua komponen masyarakat tentu mustahil akan melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun.

Untuk itu harapan kami supaya semua pihak dapat mendukung rencana ini baik itu dari pemerintah kabupaten sebagai pembina supaya dapat memfasilitasi baik dari segi pendanaan dan dari segi sumber daya manusia untuk selalu dapat membina OPD khususnya Kecamatan Poncowarno dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan juga pihak swasta/ pengusaha diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih bertanggung jawab sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal serta masyarakat sebagai pemanfaat, pengawas dan pemelihara diharapkan juga lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kebumen, 30 Juli 2025

CAMAT PONCOWARNO,



WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penyusunan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2024	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra sampai Tahun 2025	5
B. Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno	15
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno	18
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	27
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	27
B. Tujuan dan Sasaran Renja	28
C. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	33
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026	35
BAB V PENUTUP	44
Catatan Penting	44
Kaidah-kaidah Pelaksanaan	44
Rencana Tindak Lanjut	45
Lampiran	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2024	7
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2025.....	10
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	17
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.6	Daftar Usulan Prioritas Desa yang akan Diusulkan ke Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ...	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno	27
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno.....	28
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	30
Tabel 3.4	IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026	32
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	33
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2026	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Poncowarno
Lampiran 2	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Lampiran 3	Terdiri dari : Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2024 beserta lampirannya Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2024 Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2024 Notulen Musrenbangcam Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Poncowarno. Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Poncowarno sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Poncowarno sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025–2029.

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana informasi kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kecamatan Poncowarno masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 juga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“KEBUMEN BERDAYA : Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-4 (empat) yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi”.

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Poncowarno untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2026.

D. Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

- A. Catatan Penting
- B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sampai Tahun 2025

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Poncowarno saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Poncowarno tahun lalu, yaitu Tahun 2024 dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

- 1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- 2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja. Kegiatan yang diukur dari hasil capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Disamping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1

(satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
	Tujuan				
	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	90,12	103,58%
	Sasaran				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	87,00	88,77	102,03%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan dengan indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 87,00 sedangkan realisasi 88,77 dan persentase capaian kinerja tahun 2024 dengan hasil 102,03% masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada Tahun 2024 Kecamatan Poncowarno menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.306.231.000,00. Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja 95,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	8.435.100	93,72
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.900.600	97,52
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.534.500	90,69
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.779.927.000	1.693.625.157	95,15
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.322.000	1.677.822.278	95,15
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000	15.802.879	95,17
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.966.000	49.700.150	99,47

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	1.396.000	99,71
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.235.000	26.220.000	99,94
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.899.350	98,74
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.250.000	2.250.000	100
9.	Penyediaan Bahan/ Material	8.081.000	8.074.800	99,92
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	3.860.000	96,50
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000	9.945.000	90,41
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	9.945.000	90,41
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.300.000	57.752.576	69,33
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	100,00
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000	26.731.076	51,41
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.750.000	30.471.500	99,09
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.891.000	59.034.500	98,57
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.891.000	32.142.500	97,72
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	1.895.000	94,75
17.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.997.000	99,99
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.200.324.000	1.176.995.840	98,06
18.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	56.090.000	52.915.120	94,34
19.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.234.000	1.124.080.720	98,24

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.433.000	12.402.000	99,75
20.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.433.000	12.402.000	99,75
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000	93.259.650	92,90
21.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	13.660.100	91,07
22.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	8.534.500	85,35
23.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	14.700.300	98,00
24.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.095.250	95,48
25.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.390.000	27.843.200	91,62
26.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	9.425.800	94,26
JUMLAH		3.306.231.000	3.161.149.973	95,61

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh Sub Kegiatan terlaksana dengan baik, meskipun secara keuangan terdapat capaian sub kegiatan yang tidak mencapai 100%, namun secara fisik 100% kegiatan dilaksanakan.

Adapun capaian pelaksanaan Renja sebagaimana Tabel 2.3 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021–2026 sampai Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Poncowarno

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Poncowarno) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11 = (10/4)
7			Unsur Kewilayahan								
7	01		KECAMATAN								
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	55 dokumen	22 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	20%
7	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	25 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	20%
7	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	20%
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	85 orang	29 orang	16 orang	13 orang	81,25	16 orang	18,8%
7	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75	4 dokumen	20%

1			2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar)	20 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	20%
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan / material	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	40 orang	16 bulan	8 orang	8 orang	100	8 orang	8 orang	20%
7	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	49 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100	7 unit	7 unit	14,3%
7	01	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	0	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	6 unit	0	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	49 unit	0	3 unit	-	-	7 unit	7 unit	14,3%
7	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 unit	1 unit	0	1 unit	100	0 unit	0 unit	0%
7	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
7	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	116 unit	48 unit	24 unit	24 unit	100	24 unit	24 unit	20,7%
7	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	60 unit	24 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	12 unit	20%
7	01	01	Pemeliharaan Meubel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala meubelair	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan peralatan perbaikan kerja	50 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	20%
7	01	01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	33%
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik								
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	28 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100	6 jenis	6 jenis	21%
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	25 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	20%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	NA	0	0	0	0	0	0	0
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	10 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	20%
7	01	05	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	10 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	20%
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
7	01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	40 kegiatan	16 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	8 kegiatan	8 kegiatan	20%
7	01	06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	55 desa	22 desa	11 desa	11 desa	100	11 desa	11 desa	20%

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	11 desa	0	-	-	-	-	-	0
7	01	06	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	4 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	100	0 kegiatan	0 kegiatan	0
7	01	06	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	20%
7	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	20%
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	10 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	20%
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pem berdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK dan Sosmasy)	25 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	5 kegiatan	5 kegiatan	20%
7	01	06	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	10 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	20%

B. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa fungsi dari kecamatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Poncowarno, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Poncowarno dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada

- masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	87,00	88,00	89,00	89,00	90,12	88,00	88,50	89,00	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	-	-	87,00	88,00	89,00	89,00	88,77	88,00	88,50	89,00	

Dari Tabel 2.4 di atas target IKM Tahun 2024 sebesar 87,00 dengan capaian realisasi 88,77 ini menunjukkan capaian yang baik tentunya dengan didukung adanya ruang pelayanan publik yang nyaman ditambah dengan fasilitas ruang laktasi, toilet bagi disabilitas dan arena bermain anak.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2024 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya persentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi desa sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sampai Tahun 2024, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.
3. Data administrasi penduduk di RT/ RW kurang lengkap dan tidak sinkron dengan data yang ada;
4. Permodalan pelaku usaha kecil/koperasi/BUMDes;
5. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Poncowarno yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sebagai penunjang pelayanan;
 - b. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum semuanya diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif;
 - c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
6. Permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD): Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Poncowarno tidak ada permasalahan.
7. Permasalahan Perangkat Desa, masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien;
8. Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

9. Isu stunting di Kecamatan Poncowarno.

Stunting merupakan masalah kurang gizi pada pertumbuhan anak yang tidak sesuai rata-rata pertumbuhan yang normal. Di Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2024 terdapat 135 anak yang stunting dengan prosentase 10,8%, naik 0,09% dari tahun sebelumnya sebanyak 150 anak. Untuk itu dilakukan konvergensi stunting yakni program nasional yang menjadi kewenangan desa. Melalui dana desa kegiatan tersebut harus dilaksanakan di setiap tahun anggaran. Adapun pencegahan stunting sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kehamilan secara rutin
- b. Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil
- c. Pemberian ASI eksklusif
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih
- e. Memberikan MP ASI yang sehat
- f. Konsisten memantau tumbuh kembang anak
- g. Pemberian imunisasi lengkap

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kecamatan Poncowarno dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Renja tersebut memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang mana merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Dokumen tersebut juga mengandung informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno.

Rancangan awal penyusunan RKPD Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 terdiri atas 4 program, 9 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp.2.232.757.011,00 (*Dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sebelas rupiah*) sebagaimana Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kebumen

Kecamatan Poncowarno

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN PONCOWARNO				2.232.757.011,00					2.330.402.085,00	
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Kecamatan Poncowarno	70,03 Nillai	2.117.094.011,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Kecamatan Poncowarno	70,03 Nilai	2.197.739.085,00	
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	9.156.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	9.156.000,00	-
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.700.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.700.000,00	-
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.456.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.456.000,00	-
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.948.834.119,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.013.312.070,00	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	1.928.834.119,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	1.993.312.070,00	
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	39.250.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	39.250.000,00	

			<i>administrasi umum Perangkat Daerah</i>					<i>administrasi umum Perangkat Daerah</i>			
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.750.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ponco warno	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	1.750.000,00	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	
-	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	4.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	4.000.000,00	
-	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>8 Unit</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>9 Unit</i>	<i>40.000.000,00</i>	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	40.000000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40.000000,00	
-	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>45.350.000,00</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>45.350.000,00</i>	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	550.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	550.000,00	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	39.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	39.000.000,00	

			yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.800.000,00	
-	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>18 Unit</i>	<i>34.503.892,00</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>17 Unit</i>	<i>50.671.015,00</i>	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	21.503.892,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	23.503.892,00	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Gedung dan Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Gedung dan Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	24.167.123,00	
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	100%	5.800.000,00	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	100%	7.800.000,00	
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>		<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan</i>	<i>90 %</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>		<i>Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Poncowarno</i>	<i>100%</i>	<i>7.800.000,00</i>	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	1 Laporan	5.800.000,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	12 Laporan	7.800.000,00	
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indeks kondusivitas kecamatan	100%	13.733.000,00	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indeks kondusivitas kecamatan	100%	16.733.000,00	

7.01.05.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 Orang	13.733.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ponco warno	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	16.733.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ponco warno	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Awasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	13.733.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ponco warno	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Awasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	16.733.000,00	
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100%	96.130.000,00	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100%	108.130.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, Pendampingan penyusunan APBD	2 kali	96.130.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	108.130.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	3 Dokumen	12.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	3 Dokumen	14.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	1 Dokumen	8.820.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	1 Dokumen	10.820.000,00	

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	13.400.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	15.400.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	16.900.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	18.900.000,00	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	37.010.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	39.010.000,00	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000,00	
	JUMLAH				2.232.757.011					2.330.402.085	

Hasil analisa review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, mengalami perubahan mengingat pagu anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno menyesuaikan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2024. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Poncowarno:

Tabel 2.6
Daftar Usulan Prioritas Desa yang Akan Diusulkan ke Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Tahun 2026

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jaringan irigasi Desa (JIDES)	Kurang lancarnya Saluran Irigasi Pertanian	Desa Lerepkebumen	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Pengadaan LPJU di beberapa titik Jalan Kedungdowo	Belum adanya LPJU di beberapa titik Jalan Kedungdowo	Desa Kedungdowo	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan menuju sawah masih tanah sehingga perlu di rabat beton agar akses mudah ditempuh	Desa Karangtengah	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani	Belum tersedianya Jalan Usaha Tani	Desa Poncowarno	Dinas Pertanian dan Pangan
5.	Pemeliharaan Plat Deker	3 Buah Plat Deker Rusak Berat	Desa Jembangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Usulan	Permasalahan	Lokasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Penyediaan alsintan prapanen dan pascapanen kendaraan roda tiga	Minimnya tenaga kerja sektor pertanian sehingga perlu alat bantu untuk pengangkut hasil produksi	Desa Blater	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kurangnya akses menuju lahan Pertanian	Desa Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan
8.	Pengadaan Bibit Padi	Masih terdapat bibit padi kualitas buruk di desa	Desa Soka	Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Pembangunan Drainase Jalan	Drainase dangkal dan belum permanen	Desa Jatipurus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Pemeliharaan Jalan Berkala Ruas Jalan Lerepkebumen - Karangtengah	Jalan rusak	Desa Kebapangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Poncowarno berpedoman dan sinkron dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2025-2029. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah: “Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati serta hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dapat diuraikan bahwa isi-isu strategis yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah: “Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan.”

Semua program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen dan berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Poncowarno yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah Misi 4 (empat), yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*” yang berintegrasikan dengan program-program unggulan yang meliputi :

- 1. ASN nyaman, Terampil dan Inovatif yaitu program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.
- 2. Desa Berdaya yaitu program yang diprioritaskan untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Adapun agenda kegiatan yang akan dilakukan meliputi penguatan ekonomi Desa, penguatan tata kelola Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah

Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan / Sasaran Kecamatan
Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya	1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif	Mengimplemen- tasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		
	2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas tata pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
	3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan
	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi			

Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan / Sasaran Kecamatan
	dan Ngayemi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, dan Rukun atas dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal			

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen 2025 - 2029

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029, maka tujuan dari Kecamatan Poncowarno adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan”. Sementara sasarannya adalah meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja pada Tahun 2026
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Poncowarno	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	90,50
Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Poncowarno	Indeks Tata Kelola Kecamatan Poncowarno	100

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen 2025 – 2029

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut harus lebih *responsive* terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 2) Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
- 3) Kepemimpinan berjalan efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal;
- 4) Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
- 5) Masyarakat terlibat dalam pemberdayaan melalui kegiatan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa dan

program kegiatan pembangunan melalui padat karya terpadu.

b. Pencapaian SDG's

Dengan melaksanakan sosialisasi kepada desa/ lembaga untuk peserta rapat/kegiatan melibatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Di Kecamatan Poncowarno sudah melaksanakan di setiap rapat/ kegiatan.

c. Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Poncowarno. Pada Tahun 2026, Kecamatan Poncowarno merencanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2026, Kecamatan Poncowarno mengusung program koordinasi tingkat kecamatan dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Poncowarno.

Kecamatan Poncowarno memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumberdaya wisata alam yang tersebar di seluruh sudut wilayah (contohnya Jembatan Wisata Air, Kedungdowo Adventure Park, Wisata Alam Prabu dan lain-lain). Industri kecil di wilayah Kecamatan Poncowarno antara lain manisan salak, jenang salak, sambal salak, sriping singkong, sriping talas, opak singkong, dan lain-lain. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Poncowarno dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

e. Prioritas APBDes Tahun Anggaran 2026

APBDes Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk :

- 1) Pembangunan dan pengembangan BUM Desa/Bum Desa Bersama sebagai langkah strategis untuk mengelola potensi lokal Desa dan aset Desa dalam mewujudkan kemandirian Desa;
- 2) Pengembangan Kopdes Merah Putih sebagai mitra usaha BumDes/ Bum Desa Bersama dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan keuangan berbasis gotong royong

- 3) Pembangunan/pengembangan usaha-usaha ekonomi pertanian/ perkebunan/perikanan melalui ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan berbasis potensi dan sumberdaya lokal Desa;
 - 4) Pengalokasian anggaran untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin berupa pemberian bahan makanan;
 - 5) Pengalokasian anggaran untuk desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui kegiatan pengelolaan sampah, dan
 - 6) Pengalokasian anggaran untuk menyediakan infrastruktur Pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif melalui kegiatan pembangunan / pemeliharaan jalan poros desa.
Semua desa di Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan anggaran sesuai prioritas APBDes Tahun 2026.
 - f. Pendayagunaan BUMDes
Di Kecamatan Poncowarno, terdapat 3 (tiga) Badan Usaha Milik Desa yang sudah mulai berkembang usahanya, yakni 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola pertashop dan percetakan.
2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 adalah 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan didalamnya.
 - b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Poncowarno, meliputi semua desa yang ada di Kecamatan Poncowarno dan juga Kantor Kecamatan Poncowarno sendiri, serta beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Kebumen.
 - c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 2.330.402.085,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota	Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pencapaian IKM Kecamatan Poncowarno sesuai Perda RPJMD, dan Rancangan Akhir Renstra 2025–2029 tertuang pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks	90,40	90,50	90,55	90,60	90,65	90,70

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2025- 2029, yaitu “Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya” ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke-4 (empat) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*”.

A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas pendanaan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 memperhatikan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029, Capaian RKPD Tahun 2024 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Poncowarno yang mendukung prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.197.739.085	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.156.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.013.312.070	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.250.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.350.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.671.015	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.800.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.800.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.733.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	16.733.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
	Penugasan Kepala Daerah		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108.130.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.130.000	
	JUMLAH PAGU	2.330.402.085	

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, data Tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2026**

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikarif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PONCOWARNO						2.330.402.085,00							2.385.314.570,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.330.402.085,00							2.385.314.570,00	
	7.01	KECAMATAN						2.330.402.085,00							2.385.314.570,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Poncowarno	-			70,03 Nilai	2.197.739.085,00						-	2.246.648.944,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dpokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			6 Dokumen	9.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	9.156.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.700.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.700.000,00	KEC. PONCOWARNO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4.456.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.456.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		15.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang	Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		6.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		2.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		10.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.800.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		5.800.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			21 unit	50.671.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	39.003.892,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	23.503.892,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		23.503.892,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.167.123,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		12.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	-			100 Persen	7.800.000,00						-	8.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUBLIK														
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat poncowarno	-			100 %	7.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	8.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.800.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		8.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	16.733.000,00						-	17.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	-			1 kali	16.733.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	17.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan				50 Orang	16.733.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		17.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	18.900.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		19.550.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	39.010.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		40.671.457,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		10.650.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
JUMLAH								2.330.402.085,00							2.385.314.570,00	

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan ditahun pertama yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 – 2029. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Renja PD Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Poncowarno dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Kemudian, Renja PD Kecamatan Poncowarno ini digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2026.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2026, antara lain (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat Poncowarno, (b) peningkatan dalam proses pelayanan di kecamatan dan desa, (c) pembinaan kepada perangkat desa, (d) implementasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran, (e) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, dan (f) pemutakhiran IDM berbasis SDG's. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan supaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Apabila ketersediaan anggaran tidak tercukupi, program dan kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada Renja PD tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Poncowarno selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Poncowarno. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (*feed back*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.330.402.085,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah*) yang terdiri dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Poncowarno serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2025
CAMAT PONCOWARNO,

Wikan Tris Junanto, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 198803 1 006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Tantri	
Cahyo Riyadi	